

Perancangan Kembali Kantor Desa Hutabohu Kecamatan Limboto Barat Kabupaten Gorontalo

Nurnaningsih Nico Abdul¹, Zuhriati A. Djailani²

¹Fakultas Teknik, Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia.

email: ningsihabdul1973@gmail.com

²Universitas Negeri Gorontalo.

email: endangdjailani@gmail.com

Abstract

One of the infrastructure improvement programs in Hutabohu village is the construction of a village office and meeting hall. The implementation method is carried out in three stages 1) Primary and secondary data collection; 2) Stages of analyzing existing data and recognizing the potential in problems that arise, looking for relationships between problems so that an overview of the causes of problems arises; 3) The design stage is making design drawings which are the embodiment of ideas based on the results of the analysis that has been done previously. The results obtained are the redesign of the village office building and meeting hall to accommodate the needs of village officials and the presence of a comfortable meeting room for the village community. The hope is that the government and the community can continue this program to the development stage by means of self-management so that the community as the main actors and owners feel directly and can be fully responsible for the results of their work, so that the quality can be maximized.

Keywords: *Infrastructure; potential; village office; self-management.*

Abstrak

Salah satu program peningkatan infrastruktur di desa Hutabohu adalah pembangunan kantor desa dan balai pertemuan. Metode pelaksanaan dilaksanakan dalam tiga tahapan; 1). Pengumpulan data primer dan sekunder; 2) Tahapan menganalisis data yang ada serta mengenali potensi dalam masalah yang timbul, mencari keterkaitan antar masalah sehingga diperoleh gambaran mengenai sebab timbulnya masalah; 3) Tahapan perancangan yakni membuat gambar-gambar desain yang merupakan perwujudan ide berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan sebelumnya. Hasil yang diperoleh adalah desain kembali bangunan kantor desa dan balai pertemuan dengan mengakomodir kebutuhan ruang perangkat desa serta hadirnya ruang pertemuan yang nyaman buat masyarakat desa. Harapannya adalah pemerintah dan masyarakat dapat melanjutkan program ini ke tahapan pembangunan dengan cara swakelola sehingga masyarakat sebagai pelaku utama dan pemilik merasakan langsung serta dapat bertanggungjawab sepenuhnya atas hasil dari pekerjaannya, sehingga kualitasnya bisa lebih maksimal

Kata Kunci: *Infrastruktur; potensi; kantor desa; swakelola.*

© 2022 Universitas Negeri Gorontalo

Under the license CC BY-SA 4.0

Correspondence author: Nurnaningsih Nico Abdul, ningsihabdul1973@gmail.com, Gorontalo, Indonesia

PENDAHULUAN

Keberadaan dana desa dalam membiayai kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan serta kegiatan pemberdayaan masyarakat, memberikan pembelajaran kepada masyarakat untuk melaksanakan sistem perencanaan pembangunan *Bottom-Up Planning* dimana perencanaan pembangunan dibuat berdasarkan kebutuhan, keinginan dan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat kemudian bersama-sama dengan pemerintah menetapkan kebijakan atau pengambilan keputusan sehingga dalam hal ini posisi pemerintah hanyalah sebagai fasilitator.

Masyarakat dituntut bisa lebih mampu dan kreatif dalam menentukan kegiatan dalam skala prioritas. Sejalan dengan hal itu, Universitas Negeri Gorontalo sebagai perguruan tinggi yang selalu berusaha sinergi dengan masyarakat senantiasa peduli dengan permasalahan-permasalahan kurangnya SDM utamanya terkait dengan ketersediaan tenaga-tenaga ahli bidang keteknikan, sehingga dengan adanya Program Kampus Merdeka yang dimulai tahun ajaran 2020, yang salah satu diantaranya adalah kegiatan Proyek di Desa, merupakan salah satu peluang kesempatan bagi Fakultas Teknik Jurusan Arsitektur untuk turut mengambil peran dalam melakukan pendampingan kegiatan-kegiatan yang dimaksud dengan tetap mengutamakan protokol kesehatan di masa pandemi Covid19.

Pada kegiatan KKN di tahun 2021 ini, mahasiswa arsitektur UNG yang terdiri dari 15 orang memilih melaksanakan kegiatan di desa Hutabohu Kecamatan Limboto Barat Kabupaten Gorontalo mendukung kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) dalam program

membangun desa/KKN Tematik dengan mengusung program Peningkatan Infrastruktur dan Pemberdayaan Masyarakat Berdasarkan Potensi Lokal.

Pengertian Infrastruktur tercantum dalam beberapa versi antara lain menurut *American Public Works Association* (Stone, 1974 dalam Kodoatie, R.J.,2005), adalah fasilitas-fasilitas fisik yang dikembangkan atau dibutuhkan oleh agen-agen publik untuk fungsi-fungsi pemerintahan dalam penyediaan air, tenaga listrik, pembuangan limbah, transportasi dan pelayanan-pelayanan similar untuk memfasilitasi tujuan-tujuan sosial dan ekonomi. Jadi infrastruktur merupakan sistem fisik yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam lingkup sosial dan ekonomi. Sedangkan menurut PM SARI (2015), Pengertian Infrastruktur, menurut Grigg (1988), merupakan sistem fisik yang menyediakan transportasi, pengairan, drainase, bangunan gedung dan fasilitas publik lainnya, yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia baik kebutuhan sosial maupun kebutuhan ekonomi. Pengertian ini merujuk pada infrastruktur sebagai suatu sistem. Infrastruktur dalam sebuah sistem adalah bagian-bagian berupa sarana dan prasarana (jaringan) yang tidak terpisahkan satu sama lain. Enam kategori besar infrastruktur (Grigg): 1) Kelompok jalan (jalan, jalan raya, jembatan); 2) Kelompok pelayanan transportasi (transit, jalan rel, pelabuhan, bandar udara); 3) Kelompok air (air bersih, air kotor, semua sistem air, termasuk jalan air); 4) Kelompok manajemen limbah (sistem manajemen limbah padat); 5) Kelompok bangunan dan fasilitas olahraga luar; 6) Kelompok produksi dan distribusi energi (listrik dan gas).

Salah satu bentuk infrastruktur yang penting menjadi perhatian pemerintah desa adalah pembangunan kantor desa dan balai

pertemuan. Ini termasuk dalam salah satu kelompok bangunan infrastruktur di desa Hutabohu yang menjadi bagian dari program kerja mahasiswa selama pelaksanaan KKN. Hal ini dilakukan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sehingga perlu diprioritaskan karena dianggap sangat penting dan mendesak.



Gambar 1. Kondisi Kantor Desa Saat ini.

Kondisi bangunan yang ada saat ini membutuhkan perencanaan kembali menyesuaikan dengan kebutuhan ruang buat perangkat desa maupun untuk kegiatan-kegiatan pertemuan lainnya dimana pada perencanaan bangunan kantor desa ini seluruh perangkat dan lembaga di desa lainnya, akan memiliki ruang kerja masing-masing yang representatif. Sehingga diharapkan akan mampu untuk mendedikasikan diri lebih baik lagi, termasuk dapat pula mendongkrak semangat kerja dengan dukungan sarana dan prasarana yang memadai.

Ruang kerja yang aman dan nyaman diharapkan mampu menghasilkan ide dan gagasan untuk kemajuan desa seiring dengan tuntutan perkembangan jaman yang serba cepat mengharuskan seluruh perangkat desa mampu bekerja profesional dan mampu meningkatkan kompetensinya dalam memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Jadi sarana dan prasarananya sebagai penunjang dalam bekerja, secara bertahap juga harus dapat dipenuhi.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan perancangan kembali kantor desa ini dilaksanakan dengan mengikuti langkah-langkah berikut ini:

1. Tahap pertama

Pengumpulan data primer dan sekunder. Data primer berupa survei langsung ke lapangan. Data sekunder yaitu data yang berasal dari media, buku, narasumber dan instansi terkait. Data yang didapat kemudian diolah dan di rinci agar dapat diterima dan mengerti dengan baik.

2. Tahap Kedua

Tahapan menganalisis data yang ada serta mengenali potensi dalam masalah yang timbul, mencari keterkaitan antar masalah sehingga diperoleh gambaran mengenai sebab timbulnya masalah. Tahap ini telah didasari pada landasan teori berupa standar-standar yang berasal dari literatur, setelah itu tahap tindak lanjut dari analisi dengan berupa memecahkan masalah secara menyeluruh dan dengan pertimbangan dari berbagai segi. Peraturan-peraturan pemerintah yang berlaku, potensi yang ada serta faktor-faktor lain yang berpengaruh diolah secara terpadu sehingga diperoleh output berupa alternatif-alternatif pemecahan masalah.

3. Tahap Ketiga

Tahapan perancangan yakni membuat gambar-gambar desain yang merupakan perwujudan ide berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan sebelumnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Berdasarkan permintaan dari kepala desa Hutabohu untuk mere-desain kantor desa karena ada beberapa hal yang harus di desain kembali ataupun ditambahkan yaitu sebagai berikut:

- Belum terdapat ruang BPD
- Desainnya terlihat seperti rumah tinggal pada umumnya
- Menghilangkan sekat pada bagian ruang tertentu
- Mengubah bentuk kamar mandi
- Mendesain interior
- Desain pagar Kantor Desa

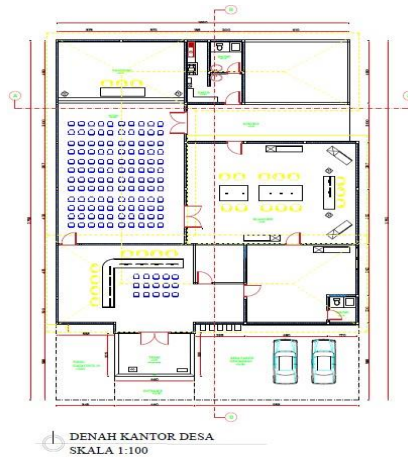
Pertama-tama dilakukan pengukuran ruangan-ruangan yang ada pada kantor desa Hutabohu lalu melakukan wawancara kepada kepala desa untuk mengetahui fungsi dari tiap ruang tersebut dan jika ukuran ruang sudah benar, sehingga diperoleh data besaran ruang Kantor Desa Hutabohu sebagai berikut.

Tabel 1
Data Ruang pada Kantor Desa dan Balai Pertemuan

No	Nama Ruang	Analisa	Besaran Ruang
1	Ruang Kepala Desa	Mengikuti Standar Ruang	6,5m x 6,05m
2	Ruang BPD	Mengikuti Standar Ruang	9,45m x 7,80m
3	Ruang Dapur	Mengikuti Standar Ruang	1,35m x 4,80m
4	Aula	Mengikuti Standar Ruang	7,45m x 10,8m
5	Panggung	Mengikuti Standar Ruang	7,45m x 4,80m
6	lobby	Mengikuti Standar Ruang	7,45m x 6,05m
7	KM/WC	Mengikuti Standar Ruang	2m x 2,5m

PEMBAHASAN

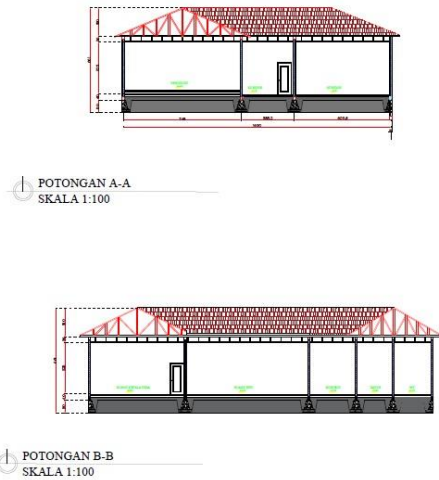
Setelah melalui tahapan analisis dan mempertimbangkan kebutuhan ruang dari hasil wawancara dengan kepala desa, maka ditransformasikan dalam gambar-gambar kerja berikut:



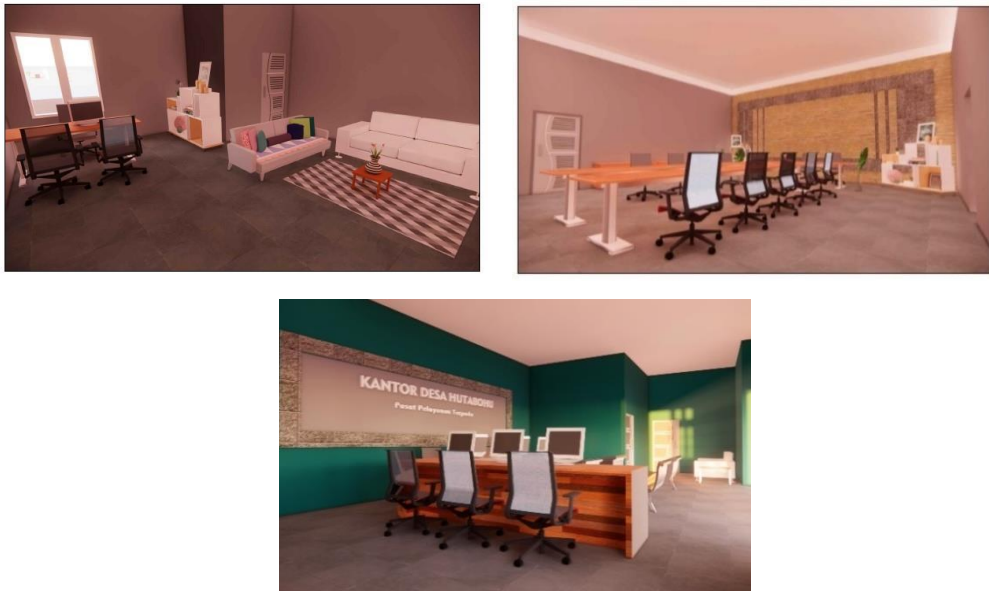
Gambar 2. Denah Kantor Desa dan Balai Pertemuan.



Gambar 3. Tampak Depan, Belakang, Samping Kiri, dan Samping Kanan Kantor Desa dan Balai Pertemuan.



Gambar 4. Potongan A-A dan B-B Kantor Desa dan Balai Pertemuan.



Gambar 5. Perspektif Interior Ruang – Ruang Kantor Desa dan Balai Pertemuan.



Gambar 6. Perspektif Eksterior Kantor Desa dan Balai Pertemuan.

KESIMPULAN

Perencanaan pembangunan dibuat berdasarkan kebutuhan, keinginan dan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat kemudian bersama-sama dengan pemerintah menetapkan kebijakan atau pengambilan keputusan sehingga dalam hal ini posisi pemerintah hanyalah sebagai fasilitator.

Masyarakat dituntut bisa lebih mampu dan kreatif dalam menentukan kegiatan dalam skala prioritas. Sejalan dengan hal itu, Universitas Negeri Gorontalo sebagai perguruan tinggi yang selalu berusaha sinergi dengan masyarakat senantiasa peduli dengan permasalahan-permasalahan kurangnya SDM utamanya terkait dengan ketersediaan tenaga-tenaga ahli bidang keteknikan.

Re desain Kantor Desa Hutabohu merupakan salah satu program yang dilaksanakan berdasarkan skala prioritas diantara program kegiatan infrastruktur lainnya yang dilaksanakan dalam kegiatan KKN ini.

Pemerintah dan masyarakat diharapkan bisa melanjutkan program ini ke tahapan pembangunan dengan memanfaatkan sumber dana dari pemerintah baik utamanya dari dana desa yang dikucurkan pemerintah

pusat di setiap tahun anggaran. Pelaksanaan bisa dengan cara swakelola sehingga masyarakat sebagai pelaku utama dan pemilik merasakan langsung serta dapat bertanggungjawab sepenuhnya atas hasil dari pekerjaannya, sehingga kualitasnya bisa lebih maksimal.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kuliah Kerja Nyata ini dapat terlaksana dengan baik berkat bantuan, bimbingan dan kerjasama dari berbagai pihak. Oleh karena itu, ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata, yaitu:

1. Dr. Ir. H. Eduard Wolok, ST. MT. selaku Rektor Universitas Negeri Gorontalo sekaligus pelindung pelaksanaan KKN.
2. Prof. Dr. Ishak Isa, M.Si., selaku Ketua LPM Universitas Negeri Gorontalo.
3. Dr. Lanto Ningrayati Amali, S. Kom., M. Kom., selaku Sekretaris LPM Universitas Negeri Gorontalo.
4. Robin Pakaya, S.Pd., M. Pd. selaku Kepala Pusat Studi KKN Universitas Negeri Gorontalo.
5. Pemerintah Kabupaten Gorontalo, yang telah memberikan izin kepada mahasiswa untuk melaksanakan Kuliah Kerja Nyata di desa Hutabohu Kecamatan Limboto Barat.
6. Bapak Rustam Hisyam Pomalingo, BE, S. Kom, selaku Kepala Desa yang telah memberikan izin, tempat dan arahan kepada mahasiswa selama pelaksanaan KKN.
7. Segenap pihak yang telah membantu mahasiswa dalam pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata yang tidak dapat kami sebutkan satu per satu.

REFERENCES

Abdul, Nurnaningsih dan Djailani, Zuhriati A. 2021. Laporan KKN MBKM (Peningkatan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan potensi lokal di desa hutabohu, kecamatan limboto barat, kab. Gorontalo). Gorontalo. LPPM UNG.

Grigg (1988) dalam PM SARI (2015) <http://e-journal.uajy.ac.id/7517/3/MTS202088.pdf>

Stone, 1974 dalam Kodoatie,R.J.,2005. American Public Works Association. <http://www.radarplanologi.com/2015/10/apa-itu-infrastruktur.html>